



**DIKTAT PERKULIAHAN
SEJARAH KETATANEGARAAN**



Oleh:

ZULKARNAIN, M.Pd

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
TAHUN AJARAN 2011**

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2011

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga atas segala anugrahnya kami berhasil menyusun modul Sejarah Ketatanegaraan ini. Penyelesaian penyusunan diktat sejarah Ketatanegaraan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yakni berupa motivasi maupun pemikiran-pemikiran yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami khususnya program studi pendidikan sejarah FISE UNY menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas segala bantuan, motivasi, dan sumbangan lainnya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk terlibat dalam penyusunan modul PPG ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi yang juga turut mendukung baik secara isi maupun teknis sehingga modul ini dapat diselesaikan.
3. Ketua program Studi Pendidikan Sejarah FISE UNY yang telah banyak memberikan dukungan sehingga modul ini dapat diselesaikan.

Modul ini disusun untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Perkuliahan Sejarah Ketatanegaraan baik di Kelas Reguler maupun di Kelas Non Reguler. Dengan modul yang sederhana ini, diharapkan mahasiswa dapat dengan mudah menemukan konsep-konsep yang benar terkait masalah Indonesia khususnya yang berhubungan dengan materi sejarah ketatanegaraan baik pada masa Orde lama, orde Barumaupun pada masa Orde Reformasi. Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan baik teori maupun metodologi. Oleh karena itu, saran dan kritik kami harapkan demi perbaikan modul ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II NEGARA DALAM KONSEP UMUM	7
A. Pengertian Negara (Satte).....	7
BAB III KONSEPNEGARA DALAM MASYARAKAT PRIMITIF.....	23
A. Kepemimpinan Masyarakat Kesukuan.....	23
B. Tribe Comunities dan Feudal Society.....	26
C. Patronase dan Paternalistik Masyarakat Kesukuan di Afrika.....	29
BAB.IV. NASIONALISME INDONESIA DALAM PERKEMBANGAN TATA NEGARA INDONESIA.....	36
A. Pengertian Nasionalisme.....	36
B. Dinamika Nasionalisme	43
C. Kebangkitan Nasionalisme	47
BAB.V.KONSTITUSI NEGARA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH.....	53
A. Pengertian dan Sejarah Konstitusi.....	53
B. Sistim Kekuasaan Dalam Konstitusi Negara.....	53
C. Konstitusi Negara Republik Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945.....	56
D. Perubahan Konstitusi Negara.....	57

E. Perubahan Konstitusi Negara dan Amandmen UUD 1945.....	61
BAB.VI. PENUTUP.....	70
DAFTAR BACAAN	72

BAB I PENDAHULUAN

Membahas sejarah tata negara baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Sedangkan wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari segi: sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik. Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dalam pembahasannya, sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep sejarah tata negara. Oleh karena itu dalam pembahasannya, sejarah tata negara tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan suatu terminologi yang lebih multidimensional dalam pendekatannya.

Pertama sejarah politik. Dari segi ehistomologis sejak Thucydides menulis Perang Peloponesiannya sebagai sejarah politik, tradisi sejarah sangat didominasi oleh sejarah politik. Lebih-lebih dalam abad ke-19 sebagai abad nasionalisme dan formasi negara nasional di Eropa Barat, sejarah politik-lah yang sangat menonjol. Dalam konsep itu, sejarah diplomasi dan perang sangat menonjol di suatu pihak, dan di lain pihak peranan para raja, panglima perang, dan negarawan memegang peranan sentral. Fenomena ini masih kuat pengaruhnya sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa jalannya sejarah ditentukan oleh kejadian politik, diplomasi, perang, dan aktivitas militer. Di samping itu ada pula teori orang besar, yang mengatakan bahwa orang besarlah yang menentukan jalannya sejarah. Fenomena ini terbukti dari banyaknya karya biografi tokoh-tokoh sampai pada Perang Dunia II. Perkembangan itu sejajar dengan berkembangnya sejarah nasional yang pada masa tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang pesat.

Mempelajari sejarah politik, tidak dapat dilepaskan dari sejarah sosial. Tulisan dengan dimensi itu dapat dilihat pada tulisan Akira Nagazumi, **“Bangkitnya Nasionalisme Indonesia”** dalam edisi bahasa Indonesia. Demikian pula sebaliknya, sejarah sosial tidak dapat dilepaskan dengan sejarah politik. Lihat tulisan Sartono Kartodirdjo, 1966, **Pemberontakan Petani Banten 1888**. Kemudian apakah yang dibahas oleh sejarah politik. Secara konvensional, sejarah politik membahas sejarah perang, sejarah parlementer, sejarah kerajaan; dan sejarah modern dalam arti teori dan metodologisnya sejarah politik membahas tema-tema yang luas misalnya biografi politik, partai politik, birokrasi, struktur politik suatu masyarakat atau negara, pemberontakan, hubungan sivil-militer dan lain sebagainya. Sejarah modern tersebut lebih bersifat tematis sehingga temanya sangat luas. Di Indonesia ada dua contoh tentang biografi politik yang dikemas menjadi sejarah politik misalnya tulisan L.D.Legge dan Dahm yang sama-sama

menulis **Tentang Soekarno**. Oleh karena itu, membicarakan biografi politik sebagai tema mikro, dapat dimasukkan sebagai bagian dari sejarah tata negara.

Kedua sosiologi politik, yang merupakan interdisiplin sosiologi yang pernah dikembangkan secara metodologis oleh Max Weber abad ke-19. Sosiologi politik dapat membicarakan tipe kepemimpinan yang menurut teori Weber ada tiga yaitu: (1) otoritas tradisional yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun temurun; (2) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; dan (3) otoritas legal rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya. Di negara-negara berkembang, tipe kepemimpinan rasional dan kharismatik sering digabungkan menjadi satu. Contohnya sebagai refleksi, dalam diskusi mengenai korupsi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Pertahanan Nasional tahun 2000 antara lain dibahas mengenai "**Merit Sistem**", yang artinya bahwa kedudukan atau jabatan harus didasarkan pada prestasi, sehingga praktek KKN tidak terjadi. Ini berarti bahwa **Merit Sistem** didasarkan pada tipe kepemimpinan rasional. Di samping itu sosiologi politik, selain membahas tipe kepemimpinan baik formal maupun in formal, juga membahas struktur politik, partai politik, partisipasi politik, hubungan sivil-militer, tokoh politik, dan peranan serta fungsi kelembagaan politik.

Adapun perbedaan antara pemimpin formal dan informal adalah pada otoritas yang dimilikinya. Pemimpin tipe formal memperoleh kekuasaan dari jabatan atau pemimpin formal, sedangkan tipe informal adalah pemimpin informal, dan pada dia ada kekuasaan karismatis. Dalam konteks Indonesia, tipe formal pada umumnya juga memiliki otoritas tradisional, ialah golongan aristokrasi yang masih mempunyai hak mewariskan jabatan, terutama yang memangku jabatan pamong praja. Pada umumnya pelbagai tipe kepemimpinan menduduki lokasi sosial-historis dengan orientasi nilai yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula reaksinya terhadap inovasi, yaitu penolakan, adaptasi, dan asimilasi. Konflik politik dapat dikembalikan kepada faktor sosiokultural dengan kepentingan ideologi atau nilai tertentu.

Dalam konsepsi ini, ahli ilmu sosiologi politik telah mengambil sistem kategorisasi jenis sistem politiknya sekaligus merupakan studi perbandingan. Analisis strukturalnya membahas status dan peranan perbagai elite, hubungan dan perbandingan kekuasaan antara mereka, kesemuanya dalam kerangka hirarkis suatu sistem feodal. Struktur kekuasaan sangat menentukan struktur sosial dengan kedudukan birokrasi yang sangat sentral fungsinya. Dalam hubungan ini sangatlah relevan menelaah kehidupan sosial antara golongan sosial, terutama dalam konteks kepentingan, status sosial, ideologi, serta sistem nilai-nilainya. Tidak dapat diabaikan kenyataan bahwa tindakan dan interaksi politik tidak dapat berjalan di luar kerangka

kebudayaan politik (*political culture*). Di sini tindakan, kelakuan, serta sikap perlu dilembagakan.

Suatu determinisme sosial sudah barang tentu berpendapat bahwa seluruh peranan seorang tokoh ditentukan oleh struktur masyarakat, atau paling tidak peranannya dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas itu, khususnya berkaitan dengan pandangan dunia. Sebaliknya, perlu diakui bahwa tokoh sejarah acapkali lebih jauh memandang ke depan atau berperan sebagai perintis atau protagonis. Protagonisme atau inovasi sering menuntut perubahan evolusioner sehingga pelaksanaannya menuntut kepribadian atau kepemimpinan yang kuat. Tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa tokoh menjadi orang marginal dan pencipta sub-kultur, akhirnya dapat menciptakan kultur dominan dalam kajian sosiologi politik.

Ketiga antropologi politik. Pada awalnya, antropologi politik membicarakan perkembangan masyarakat kesukuan, hal ini karena antropologi lebih menekankan pada sistem kekerabatan. Kemudian antropologi politik berkembang pengkajiannya pada simbol-simbol politik, satrategi politik, hubungan kebudayaan politik, serta adat-istiadat setempat dalam hubungannya dengan politik. Antropologi politik, sangat erat hubungannya dengan antropologi sosial. Sebagai permisalan, kolusi dan korupsi yang terjadi dalam pemerintah politik, akan lebih tajam pembahasannya jika dikaji dengan antropologi politik. Hal ini karena menyangkut masalah kebudayaan politik dalam hubungannya dengan korupsi.

Untuk membahas kerajaan tradisional, sebagai contoh lain, tepatlah kiranya analisis antropologi politik dipakai untuk mengupas sistem politiknya, yang mencakup otoritas kharismatis atau tradisional, patrionalisme, feodalisme, birokrasi tradisional, dan lain sebagainya. Banyak antropolog semacam itu misalnya Cunningham, Schorl, dan Schulte-Nordholt. Pada hakikatnya yang mereka hasilkan lebih merupakan sejarah struktural dengan pendekatan sinkronis. Maka dari itu, tepatlah kiranya apabila sejarawan menggarap tema yang sama secara diakronis, meskipun tanpa mengabaikan pendekatan strukturalnya.

Keempat ilmu politik. Dalam studi ilmu politik, bidang ketatanegaraan konsentrasinya hanya negara-negara modern, yaitu negara-negara yang muncul menjelang Perang Dunia I terutama kerajaan-kerajaan yang mulai meninggalkan tradisi monarkhi, dan pembahasannya dteruskan pada negara-negara setelah Perang Dunia II. Dalam hubungan ini, skenario politik baik di tingkat makro maupun mikro, dapat digambarkan secara rinci berdasarkan analisis ilmu sosial sedemikian rupa, sehingga dapat diekstrapolasikan, antara lain, (1) gejala atau pola umum perjuangan politik, (2) kecenderungan dalam proses politik yang menunjukkan

keteraturan (*regularities*). Kedua gejala ini akan menambah makna kejadian-kejadian serta memberi kemungkinan untuk membuat suatu perbandingan serta generalisasi.

Dimensi sosial dari proses politik mencakup status dan peranan elite politik: bangsawan, aristokrasi, birokrat, kaum intelegensia, elite religius, meritokrasi, teknokrasi, elite desa, dan lain sebagainya. Otoritas yang mereka miliki antara lain otoritas karismatis, termasuk pula yang sudah mengalami rutinisasi, otoritas tradisional, otoritas legal dan rasional. Bagaimana interaksi dalam proses perjuangan kekuasaan, terutama dalam periode transisi (abad ke-19 dan ke-20) sewaktu orientasi nilai-nilai bergeser sebagai dampak proses penetrasi pengaruh Barat dan modernisasi. Posisi sosial kultural elite masing-masing menimbulkan konflik, yang menimbulkan fenomena yang bernuansa dari proses sosial dan politik yang selalu berkesinambungan. Lebih jauh hal ini akan di bahas pada bab-bab berikutnya dari kajian sejarah tata negara ini.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa kajian ilmu politik, berarti memasuki wilayah kekuasaan. Karena dalam hal ini, ilmu politik berarti ilmu yang membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan baik dalam konsep yang bersahaja maupun modern, dan bagaimana cara-cara untuk mempertahankannya. Konsep ini tampak sederhana, tetapi setelah memasuki wilayah kajiannya, maka akan ditemukan fenomena-fenomena yang sangat kompleks, yang mewarnai kajian ilmu politik, dan memperkaya kajian sejarah ketatanegaraan yang akan dibahas dalam buku ini.